

ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 2023 MELALUI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Putri Kartika Dewi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2023 di Indonesia yang menjadi isu krusial dalam konteks keamanan pemilu. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak privasi dan kerahasiaan informasi pribadi pemilih, dengan potensi dampak pada integritas proses elektoral. Dengan tujuan untuk menganalisis respon atau tindakan KPU terhadap kasus ini dan juga kesesuaiannya dengan UU PDP. Penggunaan metode kualitatif untuk menjelaskan fenomena ini lebih rinci. Analisis melibatkan perspektif teoritis Alan Westin mengenai privasi, serta membandingkan respon Indonesia dengan Filipina terhadap insiden serupa. Studi ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diterbitkan, pelaksanaannya masih terbatas, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas yang efektif. Penelitian menyoroti pentingnya reformasi regulasi, perbaikan tata kelola data, penerapan prinsip "*privacy by design*" dan "*privacy by default*", serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Selain itu, peran edukasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Yang mana disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menyadarkan tanggungjawab KPU sebagai pengendali data DPT.

Kata Kunci: Kebocoran data, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Privasi, Keamanan Siber, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KPU

***ANALYSIS OF THE 2023 PERMANENT VOTER LIST (DPT) DATA LEAK
CASE FROM A LEGAL-POLITICAL PERSPECTIVE***

Putri Kartika Dewi

ABSTRACT

This study discusses the 2023 Permanent Voters List (DPT) data leak in Indonesia, which is a crucial issue in the context of election security. This case shows a violation of the privacy rights and confidentiality of voters' personal information, with potential impacts on the integrity of the electoral process. With the aim of analyzing the KPU's response or actions to this case and also its compliance with the PDP Law. The use of qualitative methods to explain this phenomenon in more detail. The analysis involves Alan Westin's theoretical perspective on privacy, as well as comparing Indonesia's response to similar incidents with the Philippines. This study finds that although Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has been issued, its implementation is still limited, mainly because an effective supervisory institution has not been formed. The study highlights the importance of regulatory reform, improving data governance, implementing the principles of "privacy by design" and "privacy by default", and cross-sector collaboration to prevent future data leaks. In addition, the role of public education is key to increasing public awareness of the importance of personal data protection. Which concludes that this study was conducted to raise awareness of the KPU's responsibility as the controller of DPT data.

Keywords: *Data leak, Permanent Voters List (DPT), Privacy, Cybersecurity, Personal Data Protection Law, KPU*